

---

## PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BBKSDA) RIAU

Haikal Ryan Anas<sup>1</sup> Raden Imam Al-Hafiz<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam

Riau, Jl. Kharudin Nasution No.133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

Email : [haikalryananas@student.uir.ac.id](mailto:haikalryananas@student.uir.ac.id) [radenimamalhafiz@soc.uir.ac.id](mailto:radenimamalhafiz@soc.uir.ac.id)

### ABSTRACT

*This study examines the application of the principle of good governance in public services in BBKSDA Riau. The research is motivated by the slow administrative process, lack of transparency, and limited access to information, which reflects the lack of optimal implementation of the principles of good governance. The goal is to analyze the extent to which the principle is applied and identify its supporting and inhibiting factors. This study uses a qualitative descriptive approach with the theory of UNDP (1997), focusing on five main indicators: transparency, accountability, responsiveness, efficiency and effectiveness, and participation. Data is collected through interviews, observations, and documentation of apparatus and service users. The results show that transparency and accountability have not been optimally run due to the lack of briefing procedures and service media. Responsiveness shows improvement through the provision of service media. Efficiency, effectiveness, and participation are quite good, although there is still room for improvement. The main obstacles are limited human resources and lack of technology utilization. However, the commitment of the apparatus and the community's need for better services are supporting factors. This study concludes the importance of reforming the service system and increasing the capacity of the apparatus so that public services are more transparent, accountable, and responsive according to the principles of good governance.*

**Keywords:** *The Application, good governance Principles, Public Services*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip *good governance* dalam layanan publik di BBKSDA Riau. Penelitian dilatarbelakangi oleh lambatnya proses administrasi, kurangnya transparansi, dan terbatasnya akses informasi, yang mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip *good governance*. Tujuannya adalah menganalisis sejauh mana prinsip tersebut diterapkan dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori UNDP (1997), berfokus pada lima indikator utama: transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas, serta partisipasi. Data dikumpulkan melalui

wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur dan pengguna layanan. Hasil menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas belum berjalan optimal karena kurangnya pengarahan prosedur dan media layanan. Daya tanggap menunjukkan perbaikan melalui penyediaan media pelayanan. Efisiensi, efektivitas, dan partisipasi tergolong cukup baik meski masih perlu peningkatan. Hambatan utama adalah keterbatasan SDM dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Namun, adanya komitmen aparatur dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih baik menjadi faktor pendukung. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya reformasi sistem pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur agar layanan publik lebih transparan, akuntabel, dan responsif sesuai prinsip tata kelola yang baik.

**Kata kunci:** Penerapan, Prinsip-Prinsip *good governance*, Pelayanan Publik

## Pendahuluan

Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

BBKSDA memiliki kewajiban serta tanggung jawab selain sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan yaitu melakukan pelayanan publik. Sedangkan pelayanan publik merupakan hal yang penting untuk melaksanakan birokrasi pemerintahan saat ini dengan lebih mengedepankan kedekatan antara pemerintahan dan masyarakat dengan pelayanan. Pelayanan publik merupakan kewajiban dan tugas pokok pemerintah yang harus dilakukan dan diwujudkan.

Urgensi penguatan BBKSDA melalui revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mencerminkan kebutuhan Indonesia untuk merespons tantangan konservasi yang semakin kompleks, mulai dari krisis biodiversitas hingga kejahatan lingkungan lintas negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/Org/7/1978 tanggal 10 juni 1978 dibentuk 8 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang perlindungan dan pelestarian alam dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Kehutanan. Agar dapat dikelola dengan baik maka BBKSDA dipecah menjadi beberapa bagian yang menyabar di seluruh Riau dan disebut dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Pelayanan Publik memiliki tujuan memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai berdasarkan dari kebijakan maupun peraturan yang bertujuan agar semua elemen masyarakat dapat merasakan layanan serta manfaat dari pelayanan itu sendiri, baik dari segi barang maupun jasa dari pelayanan administratif yang telah di selenggarakan oleh layan publik. Dalam buku *good governance* dalam Pelayanan Publik, yang disunting oleh Rosmauli (2022), terdapat pandangan yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, Salah satu fokus utama buku ini adalah bagaimana prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas, dapat terintegrasikan dalam praktik pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Prinsip yang hadir di dalam *good governance* menjadi acuan untuk instansi dan Lembaga pemerintah dalam melakukan pengembangan terhadap layanan publik yang di terapkan didalamnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka muncul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kapasitas kebijakan yang dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam pelayanan Publik Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau”**.

## Tinjauan Pustaka

### Konsep Administrasi

Ilmu Administrasi Negara lahir sejak 1887, yang lahir dari seorang presiden Amerika Serikat dengan nama Woodrow Wilson yang menjabat pada 1913-1921. Menurut Wilson, ilmuwan politik lupa bahwa kenyataannya lebih sulit menerapkan konstitusi dengan baik dibanding dengan merumuskan konstitusi itu sendiri. Sayangnya ilmu yang diperlukan untuk itu belum ada. Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan konstitusi

dengan baik maka diperlukan suatu ilmu yang kemudian disebut Wilson sebagai ilmu administrasi tersebut.

Menurut Dwight Waldo dalam buku ajar Ilmu Administrasi Publik Kontemporer (Thoha, 2008), yang mengusulkan konsep humanisasi administrasi publik. Bagi Waldo, administrasi publik harus melibatkan aspek-aspek kehidupan nyata dan kebutuhan individu. Waldo juga melihat administrasi publik bukan hanya sebagai proses teknis, tetapi juga sebagai sebuah disiplin yang sangat terkait dengan kebijakan publik, etika, dan demokrasi.

### **Konsep Organisasi**

Mukhatar (2017) menekankan bahwa kepemimpinan transformatif, yang berfokus pada perubahan positif dan pemberdayaan anggota organisasi, sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Kepemimpinan semacam ini mendorong inovasi, motivasi, dan komitmen tinggi dari seluruh anggota organisasi.

Menurut Usman (2019) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah menciptakan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan memiliki citra positif.

### **Konsep Manajemen**

Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*) upaya anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam pandangannya, manajemen didefinisikan sebagai sebuah seni dan ilmu untuk mencapai tujuan melalui kerja sama dengan orang lain dalam sebuah organisasi (Rizal, 2024).

Menurut Terry, manajemen suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Zulkifli, 2014).

---

**Konsep Pelayanan Publik**

Pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 24 ayat 1 berbunyi bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan kebutuhan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan Pelayanan Publik.

Moenir mendefinisikan pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh kelompok atau seorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Hidayah, 2020).

**Konsep *Good Governance***

Menurut Sadjijono *good governance* mengandung arti “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Dapat disimpulkan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai ingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosialbudaya, politik, dan ekonomi.

Menurut Nurhidayat (2023) dalam jurnal *E-Gov Education and Government* mengenai prinsip-prinsip *good governance*, UNDP mengusung *good governance* dalam frame democratic governance (Tata Kelola pemerintah yang demokratis), Konsep untuk *good governance* tidak bisa serta merta di implementasikan di suatu negara, perlu adanya penyesuaian terhadap karakteristik dari masing-masing negara.

**Metode**

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif dengan analisa pengumpulan data, data kemudian di reduksi dan selanjutnya data disajikan didalam kategori data. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh data dari sumber informasi yang kemudian di sesuaikan berdasarkan kategori untuk dijabarkan kedalam satu sintesa dan kemudian peneliti menjelaskan berdasarkan substansi materi jawaban yang diberikan kepada pihak berkontribusi teknis pengelolaan rusunawa serta pengguna.

Penelitian kualitatif ini (*Qualitative research*) adalah suatu penelitian yang menggunakan tahapan analisis data yang mengacu pada model Miles dan Huberman, yaitu: (1) reduksi data (pengumpulan data). Menurut Sugiyono (2017) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya; (2) penyajian data (*data display*). Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) mengatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan agar lebih mudah memahami data yang diperoleh; (3) verifikasi/penarikan kesimpulan.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian sekaligus juga pembahasan mengenai dari tanggapan Informan Penelitian tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau. Untuk pembahasan yang lebih jelas mengenai hasil dan pembahasan penelitian dapat dilihat seperti berikut:

#### Indikator Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan dan menyediakan informasi publik yang relevan dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Tanpa transparansi, masyarakat tidak memiliki dasar untuk menilai apakah suatu kebijakan atau tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2009).

Dalam penelitian Penerapan Prinsip *good governance* dalam layanan publik di BBKSDA Riau, dapat disimpulkan bahwa indikator Transparansi yang mencakup sub indikator prosedur yang jelas dan terorientasi, akses Informasi yang mudah dan mempermudah, dan pemanfaatan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan prinsip *good governance* di BBKSDA Riau.

1. Prosedur yang jelas dan Terorientasi: Meskipun prosedur sudah ditetapkan, kurangnya sosialisasi dan tidak adanya papan informasi di kantor membuat masyarakat kesulitan memahami alur dan persyaratan layanan.

2. Akses Informasi yang Mudah dan Mempermudah: Akses informasi prosedur layanan di BBKSDA Riau masih terbatas, terutama bagi masyarakat awam dan lansia yang kurang memahami teknologi. Informasi hanya tersedia di *website*.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi di BBKSDA Riau masih terbatas, dengan pembaruan informasi layanan yang tidak konsisten dan belum mendukung pelacakan daring.

Transparansi, menurut UNDP, adalah prinsip utama *good governance* yang menuntut keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik. Dwiyanto (2006) menegaskan bahwa transparansi penting untuk memungkinkan masyarakat memahami proses keputusan dan mengawasi kinerja pemerintah. Di BBKSDA Riau, prinsip ini belum optimal karena sistem informasi digital masih lemah.

#### Indikator Akuntabilitas

Mahsun (2011) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sebagai contoh konkret, penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya pada aspek akuntabilitas, dapat diamati melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BBKSDA Riau.

1. Moral dan Etika Profesional: Penerapan moral dan etika di BBKSDA Riau belum optimal, ditandai dengan keterlambatan pelayanan dan ketidaksesuaian waktu penyelesaian izin yang melebihi standar.
2. Ketepatan Waktu Pelayanan: Ketepatan waktu layanan di BBKSDA Riau belum optimal, ditandai dengan inkonsistensi penyelesaian izin, ketidakjelasan prosedur, serta kurangnya informasi dokumen yang dibutuhkan.
3. Mekanisme Pelaporan dan pengaduan: BBKSDA Riau telah menjalankan mekanisme pelaporan dan pengaduan dengan baik melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan kotak saran, serta menunjukkan respons cepat terhadap laporan masyarakat.

Penerapan prinsip akuntabilitas di BBKSDA Riau telah menunjukkan kemajuan, khususnya melalui mekanisme pelaporan dan pengaduan yang responsif dan terbuka bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori UNDP (1997) yang menyatakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat dan stakeholders atas tindakan dan keputusannya. Pandangan ini juga didukung oleh Mahsun dan LAN RI yang menekankan pentingnya transparansi dan kemampuan lembaga dalam merespons kritik secara terbuka. BBKSDA Riau telah menyediakan berbagai saluran pelaporan seperti media sosial dan *website*, namun pada praktiknya masih ditemukan kendala dalam pelayanan perizinan yang tidak sesuai standar waktu.

### Indikator Daya Tanggap

Menurut Syahril (2012) menekankan bahwa daya tanggap adalah kemampuan pemerintah untuk secara aktif dan efektif mengenali, memahami, dan merespons kebutuhan, harapan, serta aspirasi masyarakat. Dalam kerangka *good governance*, pemerintah tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, namun juga harus mampu menyesuaikan kebijakan dan program kerjanya sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi (Syahril, 2012).

1. Kesesuaian Layanan dengan Kebutuhan Masyarakat: Pelayanan publik di BBKSDA Riau telah menunjukkan responsivitas yang baik, ditandai dengan sikap ramah, empatik, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Berdasarkan wawancara dan observasi, petugas konsisten menunjukkan kepedulian, termasuk kepada warga lansia.
2. Ketersediaan Sumber Daya dalam Merespon layanan: Pelayanan publik di BBKSDA Riau menunjukkan ketersediaan sumber daya yang cukup baik dalam merespons kebutuhan masyarakat, didukung oleh beragam media layanan dan respons cepat dari petugas. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip responsivitas dalam *good governance*, sebagaimana disampaikan UNDP.
3. Respon Cepat dalam Pelayanan: Penerapan prinsip daya tanggap di BBKSDA Riau cukup baik dalam layanan langsung, dengan petugas yang responsif dan

ramah. Namun, layanan daring seperti email dan WhatsApp masih lambat ditanggapi, dan kotak saran kurang dikelola.

BBKSDA Riau telah menunjukkan responsivitas yang baik dalam layanan langsung, namun masih lemah dalam layanan tak langsung seperti *email* dan *WhatsApp* yang sering lambat ditanggapi. Kondisi ini membuat masyarakat terpaksa datang langsung ke kantor untuk kejelasan layanan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip daya tanggap menurut UNDP, serta pandangan Dwiyanto (2006) dan Tjokroamidjojo (2000), belum sepenuhnya diterapkan secara optimal.

### Indikator Efisiensi dan Efektivitas

Santoso (2009) menegaskan bahwa efektivitas mencerminkan keberhasilan kebijakan dalam mencapai hasil yang diinginkan, sementara efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam memanfaatkan sumber daya (uang, waktu, tenaga) secara hemat dan tepat guna. Dalam konteks *good governance*, pemerintahan tidak hanya dituntut untuk mencapai tujuan (efektif), tetapi juga melakukannya dengan cara yang hemat biaya dan waktu (efisien).

1. Kualitas layanan publik: Telah diupayakan melalui penyediaan layanan langsung dan tak langsung, seperti *website* dan media sosial. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, layanan tak langsung masih belum optimal, sering lambat, dan tidak memenuhi standar waktu yang ditentukan.
2. Biaya Operasional Administrasi: Dalam penggunaan biaya operasional administrasi, terutama dengan pengalihan dokumen ke bentuk digital untuk mengurangi biaya dan mempercepat proses.
3. Tingkat kepuasan Masyarakat: Penerapan prinsip efisiensi yang cukup baik, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan penyediaan layanan yang memudahkan masyarakat.

Efisiensi dan efektivitas merupakan unsur penting dalam keberhasilan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berdasarkan pandangan Mardiasmo (2002), LAN, dan teori UNDP, efisiensi menekankan pada penggunaan sumber daya yang hemat, sementara efektivitas fokus pada pencapaian tujuan yang

berdampak nyata bagi masyarakat. Di BBKSDA Riau, prinsip efisiensi telah diterapkan cukup baik melalui pengelolaan sumber daya dan layanan yang disediakan. Namun, efektivitas layanan, terutama dari sisi ketepatan sasaran dan kualitas hasil, masih perlu ditingkatkan.

### Indikator Partisipasi

Thoha (2008) partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ia menyatakan bahwa partisipasi bukan sekadar keterlibatan fisik, tetapi mencakup peran aktif warga dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Partisipasi memungkinkan terbentuknya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. penyebaran informasi kepada masyarakat: Penyebaran informasi layanan di BBKSDA Riau telah berjalan dengan baik dan mencerminkan prinsip partisipasi dalam *good governance*.
2. Keterlibatan Masyarakat Dalam penerapan *good governance*: BBKSDA Riau telah menerapkan prinsip partisipasi dalam *good governance* dengan baik melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan, pengawasan kawasan, dan program pemberdayaan konservasi.

Penerapan prinsip partisipasi dalam *good governance* di BBKSDA Riau telah berjalan dengan baik, terbukti dari keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, pengawasan kawasan konservasi, dan program pemberdayaan berbasis konservasi. Keterlibatan ini bersifat nyata dan berkelanjutan, mencerminkan kemitraan antara masyarakat dan BBKSDA, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Selaras dengan teori UNDP (1997) yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, BBKSDA Riau menyediakan forum dan media yang memfasilitasi aspirasi dan masukan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* di BBKSDA Riau telah mengalami kemajuan, terutama dalam aspek partisipasi dan responsivitas. Masyarakat merasa dilibatkan dalam kegiatan konservasi, dan petugas memberikan pelayanan yang cukup empatik. Namun, prinsip transparansi dan

akuntabilitas masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya sosialisasi prosedur dan ketidakpastian waktu layanan. Layanan melalui media daring juga belum optimal. Sesuai teori UNDP (1997), *good governance* menuntut transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta partisipasi aktif. Maka, BBKSDA Riau perlu meningkatkan kualitas informasi, memperkuat sistem digital, dan mengefisienkan prosedur agar tata kelola pelayanan publik berjalan lebih optimal dan inklusif.

### Indikator Pendukung dan Penghambat

Penerapan prinsip *good governance* didukung oleh tingginya kesadaran petugas dalam memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan komunikatif, serta adanya kerja tim dan partisipasi aktif masyarakat. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan pelayanan yang responsif dan partisipatif. Namun demikian, hambatan tetap ada, terutama dalam hal nilai moral dan etika pelayanan yang belum sepenuhnya tertanam pada sebagian petugas. Sikap kurang proaktif dan minimnya komunikasi terbuka menghambat optimalisasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Maka, penguatan integritas dan etika kerja menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

Penerapan prinsip *good governance* di BBKSDA Riau menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, khususnya dalam aspek responsivitas dan partisipasi. Hal ini tercermin dari layanan langsung yang ramah dan cepat, pemanfaatan media sosial serta platform digital sebagai saluran komunikasi, dan kesadaran petugas dalam memberikan pelayanan yang profesional. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan pengawasan juga menjadi bentuk partisipasi aktif yang mendukung kualitas layanan publik.

Namun demikian, implementasi belum sepenuhnya optimal. Terdapat tantangan berupa kendala teknis seperti gangguan jaringan dan belum stabilnya layanan daring, serta lemahnya penerapan nilai etika oleh sebagian petugas yang berdampak pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, prosedur layanan yang belum sepenuhnya tersosialisasi dan ketidakpastian dalam proses perizinan menunjukkan perlunya

penguatan baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia agar prinsip *good governance* dapat terlaksana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di BBKSDA Riau dianalisis melalui 5 indikator dan 14 sub indikator, mengacu pada pandangan Nurhidayat (2023) dengan indikator UNDP (1997) sebagai dasar penilaian. Peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Transparansi: Penerapan prinsip transparansi belum optimal. Masyarakat kesulitan mengakses informasi layanan, alur prosedur tidak jelas, dan proses administrasi kurang terbuka

Akuntabilitas: Akuntabilitas masih lemah, ditandai dengan ketidaksesuaian waktu pelayanan, kedisiplinan petugas yang rendah, dan belum adanya standar pelayanan yang konsisten.

Daya Tanggap: Sudah ada kemajuan dengan hadirnya media layanan, namun respons terhadap laporan masyarakat belum merata dan masih ditemukan keterlambatan tindak lanjut, terutama pada layanan daring.

Efisiensi dan Efektivitas: Proses layanan cukup baik dan efisien, tetapi efektivitas masih bisa ditingkatkan terutama dalam hal pengelolaan SDM dan operasional teknis

Partisipasi: Partisipasi menjadi indikator paling kuat. Masyarakat terlibat aktif baik dalam pelayanan di kantor maupun kegiatan konservasi di lapangan.

Faktor Pendukung dan penghambat: Faktor pendukung penerapan *good governance* di BBKSDA Riau adalah komitmen petugas, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan media sosial. Sementara itu, hambatannya meliputi kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, respons layanan daring yang belum konsisten, serta keterbatasan teknologi dan etika pelayanan.

Pemerintah daerah memberikan bantuan finansial dan teknis untuk mendukung petani dalam pelaksanaan peremajaan sawit. Ini mencakup subsidi dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petani. Petani menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pengetahuan tentang teknis peremajaan, keterbatasan akses ke sumber daya, dan perbedaan pandangan di antara anggota kelompok tani. Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait sangat membantu meningkatkan pemahaman petani tentang praktik terbaik dalam peremajaan sawit tetapi petani terkadang kurang paham

terkait peremajaan ini karena minimnya pendidikan. Sosialisasi sudah diberikan tapi masyarakat itu sendiri yang tidak ingin melakukan peremajaan karena kurang nya pemahaman yang dimiliki dan keterbatasan biaya.

Diperlukan peningkatan program pelatihan untuk petani agar mereka lebih memahami teknik peremajaan yang efektif. Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberhasilan program peremajaan sawit. Mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung petani kecil agar dapat berpartisipasi dalam program peremajaan dengan lebih baik.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Farouq Mulku Zahari at all (2023). Reformasi Administrasi Publik.
- Barangai, O. M. (2024). *Citizens' Awareness and Dissemination of Local Government Unit (LGU) Processes in General Santos City*. Journal of Interdisciplinary Perspectives, 2(10).
- Clements, K. A. (1998). *Woodrow wilson and Administrative Reform*. dan Implementasinya. Gava Media. data. Penerbit Andi.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). *The new public service: An approach to reform*. *International Review of Public Administration*
- Dr. Arifin Tahir, (2011). Kebijakan Publik dan Transparaansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Jakarta, PT. Pustaka Indonesia Press
- Dr. Enos Paselle, M.A.P. & Thalita Rifda Khaerani, S.A.P., M.Si. (2024), Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik Jilid I: Transparansi, Akuntabilitas, Inovasi Pelayanan dalam Menciptakan Public Value. Kalimantan Timur, Samarinda: Universitas Mulawarman
- Dr. Herdy Andry, S.Sos, M.Si, Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA (2020). Pelaku & Etika Administrasi Publik. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh
- Drs. H.A.S. Moenir (2019). Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pasuruan, Jawa Timur: Qiara Media.
- Eko Prasajo. (2010). Reformasi Birokrasi dan *Good Governance*. UI Press.
- Eva Danayanti, Kresna, Mustakim (2021). Pemetaan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Jakarta Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator*
- HS Tomo (2019): *Reformasi Birokrasi Menuju good governance*. Jakarta: Indocamp.
- Ibrahim, A. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Mandar.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP policy document*. New York: UNDP.Jogiyanto
- Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis*
- Kusdi. (2009). *Teori Organisasi dan Administrasi*. SalembaHumanika: Jakarta
- Lay, C. (2022). *Good governance dan demokrasi partisipatoris di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lay, M. R. (2022). Partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan good governance. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 517–524
- Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN RI.
- Lovelock. 1992. *Managing Service*. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2011). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Publisher
- Mufiz, Ali (2014). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R.W. & Vabiani, D.P. 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1): 51–62.
- Prof. Dr. Agus Dwiyanto. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Prof. Dr. Agus Dwiyanto. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif (edisi 2)*. Yogyakarta: UGM Pers
- Prof. Dr. H. Mukhtar, M.Pd. (2017). *Manajemen dan Pelaku Organisasi*.
- Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. (2019). *Administrasi, Manajemen, dan Kependidikan Kepemimpinan: Jawa Timur: Bumi Aksara*.
- Putra, T. M. (2019). *Pelayanan publik, good governance, dan ketahanan nasional*.
- Ratna Rosmauli Pakpahan (2022). *Good Governance dalam Pelayanan Publik: Media Sains Indonesia*.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama

- 
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik; Bagian Kedua Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Stephen P. Robbins. 1994. *Teori Organisasi. Struktur, Desain & Aplikasi*. Arcan
- Syafri, H. W. (2012). *Studi tentang administrasi publik*. Erlangga. Jakarta
- Thoha, M. (2008). *Ilmu administrasi publik kontemporer (Cet. ke-2)*. Jakarta: Kencana.
- Thoha, M. (2008). *Perilaku birokrasi dalam perspektif interaksional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- United National Development Program* 1997. (Communications Development
- Zulkifli. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen. Buku Ajar: Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.

- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.

- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.

- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. PERSPEKTIF, 13(1), 164-173.

- 
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.

- 
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.

- 
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International*

- 
- Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.

- 
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

- 
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riau, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.

- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.

- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).

- 
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.

- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.

- 
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".